

Keabsahan Badal Haji pada *Mubaddil* yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafii)

The Validity of Badal Hajj for Mubaddils Who Have Never Performed Hajj (Comparative Study of the Maliki and Shafii School)

Jahada Mangka^a, Muhamad Saddam Nurdin^b, Nurfaikah Nasrulla^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: jahadamangka@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: nurfaikah.nasrulla@gmail.com

Article Info

Received: 11 May 2024

Revised: 15 May 2024

Accepted: 15 May 2024

Published: 17 May 2024

Keywords:

Validity, Hajj, Badal Haji, Maliki School, Shafii School

Kata kunci:

Keabsahan, Haji, Badal Haji, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii

Abstract

This research seeks to ascertain the perspectives of the Maliki school and the Shafii school of thought on the validity of the badal hajj for individuals who have never performed the hajj. This research employs a qualitative methodology, utilizing comparative, normative, and conceptual approaches. The research findings revealed the following: firstly, the Maliki school of thought permits the implementation of the badal hajj for mubaddils who have never performed the hajj, and maintains that the hajj remains valid for the individual being replaced, despite some of their followers judging him as makruh. While Shafii school of thought, on the other hand, forbids the execution of the badal hajj on individuals who have never performed the hajj and declares the hajj invalid for the individual replacing them, as this action automatically transforms the hajj into a hajj. Second, the similarities between the views of the Maliki school and the Shafii school of thought lie in their use of hadiths from 'Ibn 'Abbas, attributed to the Prophet PBUH. As for the differences, the Maliki school of thought uses general postulates, while the Shafii school of thought uses specific postulates regarding the badal hajj. After reading and studying, researchers are more likely to adopt the Shafii school's perspective due to their use of unique propositions for this particular problem. In the hadith, Rasulullah observed that he commanded a mubaddil to perform his own hajj before substituting it for someone else's. According to the ulama, the opinion of the Shafii school of thought is clear.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang keabsahan badal haji pada mubaddil yang belum pernah melaksanakan haji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, mazhab Maliki membolehkan pelaksanaan badal haji pada mubaddil yang belum pernah melaksanakan haji dan menghukumi bahwa haji tersebut sah untuk orang yang digantikan, walaupun sebagian pengikutnya ada yang menghukuminya makruh. Sedangkan mazhab Syafii tidak membolehkan pelaksanaan badal haji pada mubaddil yang belum pernah melaksanakan haji dan menghukumi bahwa haji tersebut tidak sah bagi orang yang digantikan karena jika hal tersebut dilakukan maka secara otomatis haji tersebut berubah menjadi haji untuk mubaddil tersebut. Kedua, persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii yaitu penggunaan hadis Nabi saw. dari 'Ibn 'Abbās. Adapun perbedaannya, mazhab Maliki menggunakan dalil umum sedangkan mazhab Syafii menggunakan dalil khusus tentang badal haji. Setelah membaca dan

mengkaji, peneliti lebih cenderung memilih pendapat mazhab Syafii karena penggunaan dalil yang khusus untuk masalah ini. Dalam hadis juga Rasulullah saw. memerintahkan seorang mubaddil untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri sebelum menggantikan haji orang lain. Dan yang rajih menurut para ulama adalah pendapat dari mazhab Syafii.

How to cite:

Jahada Mangka, Muhamad Saddam Nurdin, Nurfaikah Nasrulla, "Keabsahan Badal Haji pada Mubaddil yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Syafii)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 387-413. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1600.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Tujuan pokok beribadah dalam Islam adalah untuk menghadap kepada Allah Swt. dengan sepuh hati dan menjaga niat yang tulus dalam setiap keadaan dengan harapan mencapai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Melalui ibadah, manusia diminta untuk melaksanakan kebaikan sesuai perintah Allah Swt. dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, ibadah bukan hanya sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain, serta menghindari perbuatan yang baik. Pahala dan siksa merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan manusia, yang bergantung pada kebaikan atau keburukan yang dilakukannya.¹

Sesuai dengan salah satu hadis Nabi saw. yang mengatakan,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)²

Artinya:

Dari Ibn 'Umar ra, dia berkata: Islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya. (H.R. Bukhārī dan sanad hadis ini sahih).

Berdasarkan hadis di atas, salah satu ibadah yang disebutkan adalah ibadah haji, ibadah haji merupakan ibadah wajib sesuai dengan kesepakatan umat Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijmak serta merupakan rukun Islam yang kelima. Syariat ibadah haji ini didasarkan pada pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 196.

¹Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Cet. I; Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2019), h. 7.

²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrahīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Dimasyq: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), h. 12.

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ ١٩٦. (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٩٦)

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) *hadyu* yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum *hadyu* sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) *hadyu* yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-nya.³

Di antara dalil lain yang menjelaskan kewajiban ibadah haji yakni pada Q.S. Ali ‘Imrān/3: 96-97.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۗ ٩٦ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۗ ٩٧. (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٩٦-٩٧)

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah (ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (baitullah) yang di bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁴

Pelaksanaan ibadah haji memanglah wajib bagi setiap umat muslim, akan tetapi penekanan kewajibannya hanya ditujukan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Hal ini menjelaskan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi mereka yang belum mampu memenuhi syarat untuk tidak melaksanakan haji. Rasulullah saw. menjelaskan makna *istiṭā’ah* dalam hadis beliau

³Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan terjemah*, h. 30.

⁴Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan terjemah*, h. 62.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: "الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ" (رَوَاهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرسَالُهُ)⁵

Artinya:

Dari Anas ra., dari Nabi saw. tentang firman Allah, "Orang yang mampu menempuh perjalanan," beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *sabīl* (perjalanan)?" Beliau menjawab, "bekal dan kendaraan." (H.R. Al-Dāraqutnī dan disahihkan oleh al-Hākim dan hadis mursal menurut pendapat yang kuat).

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kemampuan" (*al-istiṭā'ah*) adalah bekal dan kendaraan. Bekal (*al-zād*) tersebut merupakan salah satu syarat wajib haji, yakni bahwa ketika seseorang akan melaksanakan ibadah haji maka ia harus memiliki segala kebutuhan untuk mencukupi dirinya dan juga keluarga yang ditinggalkannya sampai ia kembali ke kampung halamannya dari tanah suci.⁶ Seseorang yang mampu secara finansial tetapi sudah tua atau sakit dan tidak mampu melaksanakannya, ia tetap wajib menunaikan ibadah haji walau hanya dengan menyuruh atau digantikan oleh orang lain.⁷ Hal inilah yang biasa disebut dengan badal haji.

Badal haji merupakan kegiatan menggantikan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang telah meninggal dunia dan belum sempat menunaikannya atau menghajikan orang yang sudah tidak mampu melaksanakannya secara fisik disebabkan karena suatu uzur, seperti orang yang sudah lanjut usia.⁸ Adapun dalil dari diperbolehkannya menggantikan haji orang lain yang sudah meninggal terdapat dalam hadis Nabi saw., beliau bersabda.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ ذَيْنَ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ أَقْضُوا لِلَّهِ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)⁹

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra.: “Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi saw., dia bertanya: “Wahai Nabi saw., ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, namun ia belum menunaikannya hingga beliau meninggal dunia, apakah aku bisa menghajikannya? Rasulullah saw. menjawab: ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang kepada Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi”. (H.R. Bukhārī dan sanad hadis ini sahih).

⁵Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas’ūd bin al-Nu’mān bin Dīnār al-Baghdādī al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1423 H/2003 M), h. 219.

⁶Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Nail al-Auṭār*, Juz 4 (Cet I; Miṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1993 M/1413 H), h. 341.

⁷Budi Kisworo, “Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek.” *Al Istīnbat: Jurnal Hukum Islam* 2, no.1 (2017): h. 88.

⁸Kementerian Agama RI, *Hasil Mudzakarrah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), h. 5.

⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrahīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 656-657.

Sedangkan dalil diperbolehkannya melaksanakan badal haji untuk orang yang telah tua renta terdapat pada hadis Nabi saw., beliau bersabda.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَذْرَكَتِ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)¹⁰

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra. berkata, “Datang seorang wanita dari *Khats’am* pada haji *wadā’*, wanita tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji, telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku menunaikan haji atas namanya? “Beliau menjawab, “Ya.” Dan itu terjadi pada haji *wadā’*.” (Muttafaq ‘alaih dan lafaznya dari Bukhārī).

Pelaksanaan ibadah badal haji sendiri itu hanya diperbolehkan pada dua kelompok. Pertama, *Al-Mayyit* (الميت) adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan telah meninggal lebih dahulu. Hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu; haji wajib (haji Islam, haji nazar, dan haji wasiat) dan haji sunah. Kedua, *Al-Ma’dūb* (المعضوب) adalah orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke Tanah Suci, sehingga memerlukan jasa orang lain untuk menggantikannya melaksanakan ibadah haji.¹¹

Orang yang melakukan haji bagi orang lain dipersyaratkan telah melakukan haji untuk dirinya sendiri, sesuai dengan hadis Nabi saw., beliau bersabda.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةَ؟» قَالَ: أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّجْتَ عَنْ شُبْرُمَةَ». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)¹²

Artinya:

Ibn ‘Abbās ra. meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah saw. yang mendengar seseorang berkata “Aku memenuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah.” Beliau berkata: “siapa Syubrumah?” Ia menjawab: “Syubrumah adalah saudaraku atau kerabatku”. Kemudian beliau bersabda, “Apakah kamu telah melakukan haji bagi dirimu sendiri?” Ia menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Lakukanlah haji bagi dirimu, kemudian lakukanlah haji untuk Syubrumah.” (H.R. Abū Dāwud dan Ibn Mājah dan disahihkan oleh Ibn Ḥibbān).

¹⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 657.

¹¹Sulaimān bin ‘Umar bin Maṣṣūr al-‘Ajīlī al-Azharī, *Hāsyiyah al-Jamal ‘ala Syarḥ al-Minhaj*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1417 H/1996 M), h. 388.

¹²Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 218.

Dari hadis tersebut, dapat dipahami bahwa melaksanakan haji untuk orang lain tidak dapat dilakukan secara langsung, kecuali orang yang menggantikannya itu telah menjalankan haji untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baik sebelumnya ia orang yang mampu atau tidak mampu. Tidak adanya rincian atau penjelasan lanjut dari Rasulullah saw. tentang hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang beliau tetapkan bersifat umum.¹³

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama-ulama dari berbagai mazhab. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa seseorang yang melakukan badal haji tidak perlu melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, dengan mengacu pada keumuman hadis tentang badal haji. Sementara itu, mazhab Syafii dan Hambali menganggap bahwa syarat bagi orang yang melakukan badal haji untuk orang lain adalah telah menjalankan haji untuk dirinya sendiri, berdasarkan hadis yang mengacu pada Syubrumah. Oleh karena itu, topik ini menjadi menarik untuk dibahas secara mendalam, khususnya dalam konteks perbandingan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii. Maka judul yang peneliti angkat adalah “Keabsahan Badal Haji pada *Mubaddil* yang Belum Pernah Melaksanakan Haji (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii pada konsep badal haji?
2. Bagaimana analisis komparatif pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii pada keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab “*Al Umm*” yang ditulis oleh Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī.¹⁴ Kitab ini terdiri dari empat jilid yang isinya membahas 128 permasalahan fikih. Di dalam kitab ini, ada bab khusus yang membahas tentang haji serta badal haji yang didasarkan pada pendapat dan dalil dari mazhab Syafii. Oleh karena itu peneliti mengambil kitab ini sebagai salah satu referensi yang penting dalam penelitian ini.
- b. Kitab “*Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*” yang ditulis oleh Muḥammad bin Ismā’il al-ṣan’ānī.¹⁵ Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Bulūgh al-marām* karya Imam Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. Kitab ini sangat masyhur di kalangan umat Islam dari berbagai mazhab dan golongan karena didalamnya mencakup hadis-hadis tentang hukum-hukum yang sangat diperlukan oleh umat Islam untuk dijadikan sebagai rujukan. Kitab ini terdiri dari empat jilid yang membahas diantaranya kitab taharah, salat, jenazah, zakat, haji, jual beli, nikah, jinayah, jihad, dan lain sebagainya. Oleh karena itu peneliti mengambil kitab ini sebagai rujukan untuk memahami hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Cet I; Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 25.

¹⁴Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm* (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M).

¹⁵Muḥammad bin Ismā’il al-Amīr al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2 (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nasyri wa al-Tauzi’ 1427 H/2006 M).

- c. Kitab “*Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*” yang ditulis oleh Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī.¹⁶ Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari kitab *al-Muḥaẓẓab* karya Abū Ishāq al-Syirāzi al-Syāfi’ī. Sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih al-Syāfi’ī, kitab *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab* memuat seluruh pendapat-pendapat mazhab Syāfi’ī beserta dalil-dalilnya, dengan menyebutkan pentarjihan di antara pendapat-pendapat ini. Kitab syarah ini terdiri dari juz satu sampai sembilan dan diantaranya membahas kitab haji beserta dengan dalil-dalilnya yang terkait dengannya, termasuk hadis-hadis mengenai badal haji yang merupakan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti.
- d. Kitab “*Al-Muḥaẓẓab min Fiqh al-Syāfi’ī*” yang ditulis oleh Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī Al-Syīrāzī.¹⁷ Sebuah kitab yang memuat penjelasan tentang hukum-hukum fiqh yang terkait dengan mazhab Syāfi’ī. Kitab ini berisi penjelasan yang rinci dan detail tentang berbagai aspek fikih. Kitab ini terdiri dari bab taharah hingga bab *iqrār*. Dan pada bab haji terdapat pembahasan mengenai badal haji dalam perspektif mazhab Syāfi’ī yang sesuai dengan pembahasan peneliti.
- e. Kitab “*Al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatihi*” yang ditulis oleh Muḥammad Sukḥāl al-Majjājī.¹⁸ Kitab ini merupakan salah satu buku fikih Islam tentang pendapat para ahli fikih Maliki. Kitab ini terdiri dari tiga jilid yang membahas tentang bab taharah sampai faraid. Jilid pertama kitab ini ada pembahasan tentang haji dan badal haji dalam perspektif mazhab Maliki yang sesuai dengan pembahasan peneliti.
- f. Kitab “*al-Mughnī fī Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*” yang ditulis oleh Sa’īd bin ‘Abd al-Qādir Bāsyānfar.¹⁹ Kitab ini merupakan kitab yang banyak dipakai sebagai rujukan di dalam buku-buku pedoman praktis haji dan umrah. Di dalam buku ini dipaparkan perbandingan pendapat antar mazhab dan dalil yang digunakan sehingga cocok diambil sebagai rujukan oleh peneliti terkhusus dalam membandingkan pendapat mazhab Malik dan Syāfi’ī mengenai keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji sebelumnya.
- g. Kitab “*Tahzīb al-Masālik fī Naṣrah Mazhab al-Mālik*” yang ditulis oleh Abū al-Hajjaj Yūsuf bin Dūnās al-Magribī al-Fandalāwī al-Mālikī.²⁰ Kitab ini merupakan kitab mazhab Maliki dan salah satu kitab yang penting mengenai perbedaan pendapat para mazhab. Kitab ini terdiri dari tiga jilid dan diantaranya membahas tentang bab haji sehingga cocok untuk penelitian ini. Dan jilid terakhir dari kitab ini membahas tentang bab al-salam sampai dengan bab al-diyāt.

¹⁶Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7 (al-Qāhirah: Idārah al-Ṭabā’ah al-Munīrah, 1344-1347 H).

¹⁷Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/ 1995 M).

¹⁸Muḥammad Sukḥāl al-Majjājī, *Al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 1 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1431 H/ 2010 M).

¹⁹Sa’īd bin ‘Abd al-Qādir Bāsyānfar, *al-Mughnī fī Fiqh al-Ḥajj wa al-‘Umrah*, (Cet. II; al-Riyād: Maktabah al-‘Ilm, 1414 H/1993 M).

²⁰Abū al-Hajjaj Yūsuf bin Dūnās al-Magribī al-Fandalāwī al-Mālikī, *Tahzīb al-Masālik fī Naṣrah Mazhab al-Mālik* (Cet. I; Tūnis: Dār al-Garb al-Islāmī, 1430 H/2009 M).

- h. Kitab “*al-Muntaqā Syarḥ al-Muwattaʿa*” yang ditulis oleh Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Saʿad bin Ayyūb Wārīs al-Tujaibī al-Qurtubī al-Bājī al-Andālūsī.²¹ Kitab ini merupakan syarah hadis dari kitab *al-Muwattaʿa* dan juga menjadi salah satu kitab yang dianggap sebagai salah satu sumber asli dalam fikih mazhab Maliki. Kitab ini terdiri dari tujuh jilid dan diantara pembahasannya adalah mengenai badal haji yang sesuai dengan penelitian peneliti.
- i. Skripsi yang berjudul “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)” yang ditulis oleh Febriyanti Aswin dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.²² Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Mazhab Abu Hanifah, Syafii dan Hambali membolehkan pelaksanaan badal haji bagi orang yang wajib haji tetapi memiliki uzur. Berbeda dengan ketiga mazhab di atas, mazhab Maliki tidak membolehkan perwakilan dalam ibadah haji. Adapun penelitian yang peneliti akan bahas berfokus pada pembahasan komparasi pendapat dua mazhab saja yakni mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai konsep badal haji dan keabsahannya pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji.
- j. Skripsi yang berjudul “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki” yang ditulis oleh Ika Ruswanti dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.²³ Hasil penelitian ini diketahui bahwa menurut mazhab Hanafi bahwa orang yang masih hidup boleh ibadah hajinya dibadalkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki ibadah haji walaupun terdiri dari ibadah badaniyah dan maliyah, tetapi lebih dominan sisi badaniyahnya. Jenis ibadah ini mazhab Maliki tidak menerima pergantian. Adapun penelitian yang akan peneliti bahas adalah komparasi pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.
- k. Skripsi yang berjudul “Hukum Qada Haji bagi Orang yang Telah Meninggal (Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)” yang ditulis oleh Ishma Auliyah, mahasiswi program studi perbandingan mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab tahun 2022.²⁴ Kesimpulan dari penelitian ini adalah Menurut mazhab Maliki meskipun ibadah haji tergolong ibadah badaniyyah dan māliyah akan tetapi sisi *badaniyyah*-nya lebih dominan, maka ibadah haji tidak boleh digantikan. Sedangkan menurut jumhur ulama ibadah haji boleh digantikan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat pergantian ini adalah menurut imam Abu Hanifah orang yang menggantikan hajinya tidak harus orang yang sudah haji wajib, beliau mengkiaskan kepada zakat. Adapun imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang menggantikan haji tersebut harus orang yang melakukan haji wajib, sebagaimana hadis dari Ibn ‘Abbās ra. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada komparasi

²¹Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Saʿad bin Ayyūb Wārīs al-Tujaibī al-Qurtubī al-Bājī al-Andālūsī, *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwattaʿa* (Cet. I; Miṣr: Matbaʿah al-Saʿādah, 1332 H)

²²Febriyanti Aswin, “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019).

²³Ika Ruswanti, “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saifuddin Zuhri, 2021).

²⁴Ishma Auliyah, “Hukum Qada Haji bagi Orang yang Telah Meninggal (Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2022).

mazhab yang dipilih dan analisisnya, penelitian ini mengkomparasikan antara mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengenai hukum qada haji bagi orang yang telah meninggal beserta dengan syarat-syarat dan masalah-masalahnya sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas adalah komparasi antara mazhab Malik dan mazhab Syafii mengenai keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur-prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.²⁵ Selain itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta menggunakan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung untuk pembahasan penelitian.²⁶ Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun, mengolah serta menganalisis sebuah data yang bersumber dari perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber lainnya.²⁷

Metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dialektika argumentatif masing-masing pendiri mazhab fikih atau beberapa tokoh sebagai bentuk uji validitas dari masing-masing argumen.²⁸ Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk membandingkan dua pendapat yang berbeda antara pendapat mazhab Maliki dan pendapat mazhab Syafii berdasarkan metode istidlal yang kedua mazhab tersebut gunakan.
- b. Pendekatan normatif (*normative approach*) adalah sebuah pendekatan yang mengacu kepada nas seperti teks ayat al-Qur'an, hadis dan pendapat dari para ulama.²⁹ Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menganalisis pendapat dari mazhab Maliki dan mazhab Syafii berdasarkan dalil-dalil dari ayat atau hadis.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menganalisa konsep-konsep dan bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum tersebut.³⁰ Dan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan pendapat atau sudut pandang dari mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji yang nantinya akan dikaji dan dianalisis.

²⁵Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 4.

²⁶Fina Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 2.

²⁷Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 3-4.

²⁸Rusdin Tahir, dkk., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktiki* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 97.

²⁹Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h. 42-43.

³⁰Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, h. 90.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber rujukan bagi peneliti adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.³¹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah dari beberapa penelitian terdahulu, al-Qur'an, hadis, beberapa kitab dari mazhab Maliki dan mazhab Syafii yang berkaitan dengan haji dan badal haji, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengolahan data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komparatif. Metode komparatif adalah metode yang menggunakan metode deduktif dan induktif secara bersamaan.³² Dengan mendeskripsikan dan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dari objek yang akan diteliti. Serta menganalisis dan memahami isi dari kitab-kitab fikih yang telah diperoleh dan sejumlah data yang berbeda dengan cara membandingkan data yang satu dengan yang lainnya, lalu menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Metode komparatif dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapat dari mazhab Maliki dan syafii mengenai keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam konsep badal haji.
- b. Mengetahui analisis komparatif pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii pada keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti menambah dan mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan dan dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi para peneliti selanjutnya terkait dengan badal haji.

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai penelitian yang membahas tentang khilaf diantara dua mazhab yakni mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai masalah khilaf ini dan sebagai bahan bagi peneliti dalam menuangkan gagasannya dan berusaha menganalisis dari beberapa rujukan yang digunakan terkait masalah khilaf yang dibahas.

PEMBAHASAN

Pandangan Mazhab Maliki dalam Konsep Badal Haji

Mazhab Maliki (dalam pendapatnya yang sah) mengatakan bahwa orang yang masih hidup tidak boleh digantikan hajinya baik haji wajib maupun haji sunah, atau dengan upah atau tidak. Upah dalam hal ini tidaklah sah, karena haji merupakan amalan fisik yang tidak dapat digantikan seperti salat dan puasa. Adapun badal haji bagi orang

³¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 68.

³²Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2023), h. 36.

yang sudah meninggal itu diperbolehkan dengan syarat orang tersebut berwasiat untuk digantikan hajinya. Maka dalam hal ini, badal haji tersebut sah walaupun hukumnya makruh.³³

Mazhab Maliki juga bersepakat dengan mazhab Hanafi bahwasanya boleh menggantikan haji orang yang sudah meninggal dengan syarat orang tersebut telah berwasiat dan biaya pelaksanaan wasiatnya ini diambil dari sepertiga hartanya.³⁴ Mazhab Maliki melarang adanya badal haji karena ibadah haji merupakan ibadah yang berkaitan dengan fisik dan bukan harta. Hal ini juga dikarenakan telah ada ijmak dari para ulama bahwa seseorang yang sehat dan mampu untuk melaksanakan haji sendiri, memiliki harta untuk membayar seseorang untuk melaksanakan haji atas nama dirinya, atau mendapati seseorang yang secara sukarela melaksanakan haji untuk dirinya atau dengan hartanya, maka kewajiban haji untuk dirinya sendiri itu tidak gugur, begitu pula dengan orang yang sakit namun masih diharapkan kesembuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban haji itu berkaitan dengan fisik dan bukan dengan harta.³⁵

Adapun seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dikarenakan sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, atau karena usia yang sudah tua (المعْضُوب) sehingga tak mampu untuk berlama-lama di atas kendaraan, maka kewajiban hajinya telah gugur dan tidak wajib bagi mereka untuk dibadalkan, begitu pula dengan orang yang sudah tidak mampu untuk mengadakan perjalanan ke Makkah, maka kewajiban hajinya telah gugur walaupun ia adalah orang yang mampu secara finansial dan mampu untuk menyewa seseorang untuk membadalkan hajinya atau ada seseorang seperti anak atau keluarganya yang sukarela ingin melaksanakan haji atas namanya.³⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imrān/3: 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ ۙ . (سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ٩٧)

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.³⁷

Ibn ‘Abd al-Barr yang merupakan salah satu tokoh mazhab Maliki mengatakan bahwasanya orang yang tidak mampu untuk mengadakan perjalanan ibadah haji maka telah gugur kewajiban haji atas dirinya dan tidak wajib baginya untuk meminta seseorang untuk melaksanakan haji atas nama dirinya dengan hartanya atau meskipun ada orang lain yang ingin melaksanakan haji atas dirinya dengan hartanya.³⁸ Jika ada seseorang yang

³³Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3 (Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.), h. 2098.

³⁴Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, h. 2102.

³⁵Muḥammad Sukhāl al-Majjājī, *Al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 1 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1431 H/ 2010 M), h. 315-316.

³⁶Muḥammad Sukhāl al-Majjājī, *Al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 1, h. 316.

³⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2021 M), h. 62.

³⁸Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘Āṣim al-Namarī al-Qurtubī, *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 1 (Cet. II; al-Riyād: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah, 1400 H/ 1980 M), h. 357.

menyuruh orang lain untuk berhaji atas nama dirinya sedangkan ia masih dalam keadaan hidup walau sebenarnya tidak mampu, maka ia telah mengatassnamakan sesuatu yang tidak wajib baginya, oleh karena itu ia tidak boleh memberikan upah atau bayaran kepada *mubaddil* tersebut, karena badal haji nya tersebut tidak sah.³⁹

Adapun badal haji bagi orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan dengan syarat bahwa orang yang meninggal tersebut telah berwasiat untuk dibadalkan hajinya. Di dalam kitabnya *al-Mudawwanah*, imam Malik menyebutkan bahwa orang yang meninggal dan belum pernah melaksanakan ibadah haji atau dalam istilah arab disebut *ṣarūratun* (صَرُورَةٌ), juga tidak pernah berwasiat maka keluarganya tetap boleh berhaji atas namanya dengan sukarela walaupun hukumnya makruh.⁴⁰ Inilah pendapat yang masyhur dari perkataan Malik dan para pengikutnya. Namun sebagian pengikutnya yang lain menyelisihinya.

Ibn Ḥabīb mengatakan bahwa keringanan haji diberikan kepada orang yang sudah tua dan tidak dapat mengadakan perjalanan kesana, juga kepada orang yang telah meninggal dunia dan belum sempat melaksanakan haji, maka anak atau keluarganya dapat melaksanakan haji atas namanya walaupun ia belum sempat berwasiat sebelum meninggal dan pahala akan diberikan kepada *mubaddil* tersebut.⁴¹

Dalam pelaksanaan badal haji, mazhab Maliki tidak mempersyaratkan seorang *mubaddil* yang sudah pernah melaksanakan haji, begitu pula untuk haji yang dilakukan karena sukarela, walaupun dua kondisi tersebut dihukumi makruh jika dilaksanakan. Tidak dipersyaratkannya hal tersebut karena ibadah haji wajib itu bisa diakhirkan, seperti halnya boleh mendahulukan yang sunah, misal bolehnya mendahulukan salat sunah sebelum melaksanakan salat wajib, hal itu boleh dilaksanakan selama tidak ada waktu yang membatasinya.⁴² Sebagai penguat dalam pendapatnya, mazhab Maliki menggunakan dalil umum dari hadis Nabi saw. tentang bolehnya melaksanakan badal haji. Dalil dan argumentasi yang digunakan mazhab Maliki dalam pendapatnya yakni, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās. Rasulullah saw. bersabda.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَثَعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نعم). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)⁴³

Artinya:

³⁹Muḥammad Sukḥāl al-Majjājī, *Al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 1, h. 316.

⁴⁰Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 458.

⁴¹Abū Muḥammad Jalāluddīn ‘Abdullāh bin Najm bin Syāsy bin Nizār al-Jazāmī, *Aqd al-Jawāhir al-Ṣamīnah fi Mazhab ‘Ālim al-Madīnah*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Gharb al-Islamī, 1423 H/ 2003 M), h. 268.

⁴²Muḥammad Sukḥāl al-Majjājī, *Al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 1, h. 318.

⁴³Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin ‘Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ja‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Dimasyq: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), h. 657.

Telah diceritakan kepada kami Mūsā bin ‘Ismā’īl: telah diceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz bin Abī Salamah: Telah diceritakan kepada kami Ibn Syihāb, dari Sulaimān bin Yasār, dari Ibn ‘Abbās ra. berkata: “Datang seorang Wanita dari *Khats’am* pada haji *wadā’*, wanita tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji, telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku menunaikan haji atas namanya? “Beliau menjawab, “Ya.” Dan itu terjadi pada haji *wadā’*.” (Muttafaq ‘alaih dan lafaznya dari Bukharī).

Hadis ini merupakan salah satu dalil umum bolehnya melaksanakan haji atas nama orang lain, hadis ini digunakan oleh mazhab Maliki dalam pendapatnya bahwa syarat menggantikan haji orang lain tidak perlu sudah pernah berhaji sebelumnya. Karena dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. tidak menanyakan kepada wanita tersebut apakah ia sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri atau belum.⁴⁴

Kemudian hadis lain yang digunakan dalam argumentasi mazhab Maliki juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās. Rasulullah saw. bersabda.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا، مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ: "حُجِّي عَنْ أَبِيكَ". (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)⁴⁵

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbās ra.: Ada seseorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw. tentang ayahnya, beliau sudah meninggal dan belum melaksanakan haji. Rasulullah saw. bersabda: “laksanakanlah haji untuk ayahmu”. (H.R. Al-Nasāī dan sanad hadis ini sahih)

Hadis ini pun tidak menyebutkan secara khusus bahwa seorang *mubaddil* harus sudah berhaji sebelumnya dan Rasulullah saw. juga tidak menanyakan hal itu kepada perempuan tersebut. Mazhab Maliki menjadikan hadis ini sebagai penguat dari pendapatnya dengan alasan yakni: Pertama, perkataan Rasulullah saw. kepada seorang perempuan Khaṣ’amīyah yang mengatakan: “laksanakanlah haji untuk ayahmu”, hal ini dikatakan oleh beliau tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah perempuan ini telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri atau belum. Ini menunjukkan bahwa hadis ini berlaku umum untuk semua keadaan, baik *mubaddil* tersebut sudah pernah melaksanakan haji sebelumnya atau belum. Kedua, larangan dalam hadis tentang Syubrumah (dalil yang dipakai oleh mazhab Syafii) itu bukanlah bertujuan untuk pelarangan badal haji, melainkan karena dikhawatirkan bahwa *mubaddil* tersebut melupakan kewajiban haji untuk dirinya sendiri. Ketiga, Periwiyatan hadis tentang Syubrumah itu berhenti pada Ibn ‘Abbās atau tidak sampai pada Nabi saw. Keempat, bolehnya menggabungkan hadis ini dan hadis tentang Syubrumah, hanya saja hadis tentang Syubrumah mengarah pada kewajiban untuk mendahulukan haji untuk diri sendiri sebelum melaksanakan haji untuk orang lain. Kelima, dibolehkan adanya seorang *mubaddil* dalam ibadah haji, maka boleh seseorang menggantikan haji orang lain walaupun belum gugur kewajiban haji untuk

⁴⁴Abdullāh bin Muḥammad, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Juz 4 (Cet. II; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1433 H/ 2012 M), h. 36.

⁴⁵Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albanī, *Ṣaḥīḥ Sunan al-Nasāī*, Juz 2 (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-Tarbiyah al-‘Arabī Liduwal al-Khalīj, 1409 H/ 1988 M), h. 559.

dirinya sendiri. Keenam, sesungguhnya pelaksanaan haji untuk diri sendiri itu tidaklah wajib pada waktu tertentu. Karenanya, kapanpun waktu yang boleh digunakan untuk berhaji bagi dirinya sendiri, juga boleh digunakan untuk berhaji atas nama orang lain. Hal ini juga disepakati oleh Ḥasan, Ibrāhīm, Ayyūb al-Sikhtiyānī, Ja'fār bin Muḥammad, Abū Ḥanīfah dan pengikutnya.⁴⁶

Pandangan Mazhab Syafii dalam Konsep Badal Haji

Dalam kitabnya “*al-Umm*”, Imam Syafii menulis bahwa Rasulullah saw. pernah menyuruh seorang perempuan Khas'amiyyah untuk menghajikan bapaknya, beliau bersabda.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِمْ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّتْقِ الْآخَرِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).⁴⁷

Artinya:

Dari Ibn 'Abbās ra. berkata, “Saat itu *Al-Faḍl bin 'Abbās* dibonceng oleh Rasulullah saw., lalu datanglah seorang Wanita dari *Khats'am*, sehingga al-Faḍl melihat orang tersebut dan ia pun melihat kepadanya. Lalu Rasulullah saw., memalingkan wajah al-Faḍl ke arah yang lain. Maka wanita tersebut bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku menunaikan haji atas namanya? “Beliau menjawab, “Ya.” Dan itu terjadi pada haji *wadā'*.” (Muttafaq 'Alaih, dan lafaz ini dari Bukhārī).

Dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwa para ulama bersepakat bahwa seseorang harus melaksanakan minimal satu kali haji dalam hidupnya, yaitu haji Islam, jika ia merupakan orang yang mampu. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *istiṭā'ah* (mampu). Namun Syafii memahami bahwa yang dimaksud dengan *istiṭā'ah* adalah adanya bekal dan kendaraan.⁴⁸ Imam Syafii menjelaskan dalam kitabnya “*al-Umm*” bahwa hadis Rasulullah saw. diatas menunjukkan bahwa firman Allah yang menyatakan bahwasanya ibadah haji hukumnya wajib bagi orang yang sanggup untuk menempuh perjalanan, kesanggupan tersebut mempunyai dua makna, Pertama, sanggup dengan diri dan hartanya sendiri. Kedua, tidak sanggup untuk melaksanakannya sendiri karena kondisinya yang telah tua renta, sakit, memiliki cacat di tubuhnya sehingga ia tidak mampu berlama-lama berada di atas kendaraan. Namun, dalam hal ini ia mampu

⁴⁶Sa'īd 'Abd al-Qādir Bāsyānfar, *Al-Mugnī fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*, (Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1414 H/1993 M), h. 52.

⁴⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H), h. 101.

⁴⁸Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abd Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 185.

menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya dengan cara memberikannya upah ataupun tidak. Maka dalam kondisi kedua ini, haji tetap berlaku wajib baginya walau dengan menyuruh orang lain untuk menghajikannya.⁴⁹

Imam Syafii membolehkan adanya badal haji dalam dua kondisi:

1. Orang yang dibadalkan dalam kondisi yang *ma'dūb* (المَعْضُوب) atau lemah, yakni orang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri dikarenakan usianya yang telah tua, memiliki penyakit yang kronis dan sejenisnya sehingga membuatnya tidak dapat berlama-lama di atas kendaraan.⁵⁰ Maka, dalam kondisi ini ia tetap wajib melaksanakan haji jika ia mendapati orang yang sanggup menggantikannya dengan memberikannya upah (dengan syarat upah ini harus melebihi kebutuhan hajinya seperti halnya jika ia melaksanakan haji untuk dirinya sendiri) atau tidak (menggantikannya dengan sukarela).⁵¹
2. Orang meninggal yang belum pernah melaksanakan haji.⁵² Maka wajib bagi ahli warisnya mencari orang yang mampu berhaji atas namanya dengan mengambil harta dari harta warisannya sebagaimana harta tersebut juga dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya. Biaya yang dikeluarkan oleh ahli waris dari harta warisan *mawayyit* hanya untuk biaya pulang dan pergi *mubaddil* tersebut.⁵³

Dalam kitab *majmū'* yang ditulis oleh al-Nawawī disebutkan bahwa dalam mazhab Syafii ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang *mubaddil* haji, yakni: pertama, muslim, balig, merdeka dan berakal. Kedua, sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Keempat, tidak termasuk ke dalam kategori orang yang lemah atau *مَعْضُوبٌ*.⁵⁴

Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab Syafii justru melarang pelaksanaan badal haji jika *mubaddil* tersebut belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Adapun alasan yang digunakan oleh mazhab Syafii yakni kembali pada hadis tentang Syubrumah. Rasulullah saw. bersabda.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟». قَالَ أَخِي، أَوْ قَرِيبِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ)⁵⁵

Artinya:

⁴⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), h. 132.

⁵⁰Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 365.

⁵¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, h. 2098.

⁵²Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḏḏab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, h. 365.

⁵³Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3, h. 2098.

⁵⁴Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, Juz 7 (al-Qāhirah: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H), h. 95-96.

⁵⁵Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'aṣ al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 218.

Ibn ‘Abbās ra. meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah saw. yang mendengar seseorang berkata “Aku memenuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah.” Beliau berkata: “siapa Syubrumah?” Ia menjawab: “Syubrumah adalah saudaraku atau kerabatku”. Kemudian beliau bersabda, “Apakah kamu telah melakukan haji bagi dirimu sendiri?” Ia menjawab, “Belum.” Beliau bersabda, “Lakukanlah haji bagi dirimu, kemudian lakukanlah haji untuk Syubrumah.” (H.R. Abū Dāwud, Ibn Mājah dan disahihkan oleh Ibn Ḥibbān).

Dalam syarahnya, hadis ini menjelaskan bahwa dalam bidang fikih, ada pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh melaksanakan haji untuk orang lain sampai dia melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dan ada juga yang mengatakan bahwa seseorang dapat melaksanakan haji untuk orang lain jika ia sudah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.⁵⁶

Namun hadis ini menjadi dalil bahwasanya tidak boleh seseorang melaksanakan haji atas nama orang lain jika ia sendiri belum melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Jika ada yang berihram atas nama orang lain, maka secara tidak langsung ihram tersebut menjadi ihram untuk dirinya sendiri. Sebab dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkannya untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri padahal orang tersebut telah bertalbiah, artinya ia telah memulai ihram dan telah memasuki ibadah haji atas nama Syubrumah. Akan tetapi, niat tersebut tidak dianggap untuk orang lain, jika tidak tentu orang tersebut wajib untuk menyelesaikan ibadah haji yang ia lakukan atas nama Syubrumah.⁵⁷

Pada hadis tersebut terdapat kalimat yang artinya “Laksanakanlah haji bagi dirimu, kemudian laksanakanlah haji untuk Syubrumah”. Kalimat pada hadis tersebut menunjukkan wajibnya bagi seseorang untuk melaksanakan haji bagi dirinya sendiri dan menggugurkan kewajibannya sebelum ia melaksanakan haji untuk orang lain. Ibn Ḥibbān berkata: “Rasulullah saw. bersabda: ((Laksanakanlah haji bagi dirimu)), ini menunjukkan perintah yang wajib. Kemudian beliau juga bersabda: ((Kemudian laksanakanlah haji untuk Syubrumah)), ini menunjukkan perintah yang mubah.⁵⁸

Hadis tersebut jelas menyebutkan bahwa tidak boleh seorang *mubaddil* melaksanakan haji atas nama orang lain sedangkan dirinya sendiri belum melaksanakan haji, baik ia adalah orang yang mampu atau tidak mampu. Hal ini dikarenakan Rasulullah saw. tidak menjelaskan secara rinci orang yang bertalbiah atas nama Syubrumah dalam hadis tersebut.⁵⁹ Argumentasi lain dari mazhab Syafii juga karena ibadah haji merupakan ibadah fisik yang secara asal memang wajib untuk dilaksanakan dan ibadah yang tidak bisa dilaksanakan atas nama orang lain jika belum dilaksanakan untuk diri sendiri,

⁵⁶Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad Al-Khaṭṭābī, *Ma’ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāud)*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/ 1997 M), h. 172.

⁵⁷Muḥammad bin Ismā’īl al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2 (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1427 H/ 2006 M), h. 506-507.

⁵⁸Sa’īd ‘Abd al-Qādir Bāsyānfar, *Al-Mugnī fī Fiqh al-Hajj wa al-‘Umrah*, h. 51.

⁵⁹Ubaidillāh al-Raḥmānī al-Mubārakfūrī, *Mir’āh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ*, Juz 8 (Cet. III; Banāras al-Hindi: Idārah al-Buḥūṣ al-‘Ilmiyyah wa al-Da’wah wa al-Iftā, 1404 H/ 1984 M), h. 409.

mazhab Syafii mengkiaskannya seperti seorang anak kecil, budak dan orang kafir yang tidak bisa melaksanakan haji atas nama orang lain.⁶⁰

Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

Secara umum, para ulama mazhab telah memperbolehkan adanya pelaksanaan badal haji sebagai pengganti ibadah haji bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya, kecuali mazhab Maliki. Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa mazhab Maliki hanya memperbolehkan pelaksanaan badal haji pada orang yang sudah meninggal dengan syarat orang tersebut telah berwasiat sebelum meninggal untuk digantikan hajinya walaupun hukumnya makruh. Sedangkan mazhab Syafii memperbolehkan pelaksanaan badal haji untuk orang yang lemah dan orang yang sudah meninggal. Namun, dalam pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mubaddil* haji.

Kedua mazhab ini secara umum memperbolehkan pelaksanaan badal haji jika *mubaddil* tersebut adalah orang Islam, baligh, merdeka, berakal, juga memiliki kemampuan dari segi fisik untuk menggantikan haji orang lain. Namun, salah satu syarat yang diperselisihkan oleh kedua mazhab ini adalah mengenai status *mubaddil* tersebut. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan dalam memahami hadis Nabi saw., keumuman hadis Nabi saw. yang menjelaskan bolehnya melaksanakan badal haji justru menjadi perselisihan pendapat, khususnya dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

Menurut mazhab Maliki, badal haji boleh dilakukan oleh *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji. Mereka berpendapat bahwa hukum badal haji adalah sah (sesuai dengan persyaratan) dan dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki niat untuk melaksanakan haji namun tidak dapat melaksanakannya secara langsung karena berbagai alasan, seperti masalah kesehatan atau finansial. Al-Šaur dalam pendapatnya mengatakan bahwa: “jika engkau mampu berhaji untuk dirimu sendiri maka berhajilah, namun jika engkau tidak mampu, maka berhajilah untuk orang lain”. Seakan-akan beliau menyampaikan bahwa orang yang fakir atau orang yang tidak memiliki harta, jika tidak mampu untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, maka boleh baginya melaksanakan ibadah haji walau hanya dengan menggantikan haji orang lain.⁶¹

Dalam permasalahan ini, mazhab Maliki menggunakan dalil-dalil umum badal haji untuk menguatkan pendapat mereka, mereka berpendapat bahwa Rasulullah saw. dalam hadisnya tersebut tidak menjelaskan secara rinci bahwa syarat menjadi seorang *mubaddil* haruslah sudah pernah melaksanakan haji sebelumnya. Mazhab Maliki melihat hal ini sebagai bentuk keumuman, sehingga baik *mubaddil* tersebut sudah atau belum pernah melaksanakan haji sebelumnya, maka badal haji tersebut tetaplah diperbolehkan, walaupun ada dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa hal ini tetap dihukumi makruh. ‘Abd al-Wahhāb menjelaskan dalam kitabnya *al-Talqīn fī Fiqh al-Mālikī* bahwa makruh sebuah badal haji jika dilaksanakan oleh seorang *mubaddil* yang belum pernah

⁶⁰Abū al-Ḥajjāj Yūsuf bin Dūnās al-Fandalāwī, *Tahzīb al-Masālik fī Naṣrah Mazhab Mālik*, Juz 2, h. 136.

⁶¹Sa’id ‘Abd al-Qādir Bāsyānfar, *Al-Mugnī fī Fiqh al-Hajj wa al-‘Umrah*, h. 52.

melaksanakan haji, namun jika dilakukan maka tetap boleh dan niat ihramnya tersebut tidak berpindah kepada dirinya sendiri.⁶²

Sedangkan di sisi lain, mazhab Syafii memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dengan mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwa seorang *mubaddil* haji haruslah seseorang yang sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Adapun jika dilakukan, maka ihramnya itu kembali kepada dirinya sendiri (menjadi haji untuk dirinya) dan bukan untuk orang yang ia gantikan hajinya. Mazhab Syafii berpegangan pada zahir hadis tentang Syubrumah, karena dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa Rasulullah saw. menyuruh orang tersebut untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, kemudian untuk Syubrumah.

Namun, Ibn Yūnus al-Ṣiqilī sebagai salah satu pengikut mazhab Maliki membantah hal tersebut, perkataan Rasulullah saw. yang membolehkan seorang wanita yang bertanya kepada beliau untuk melaksanakan haji atas nama ayahnya, Rasulullah saw. juga tidak mempersyaratkan bahwa ia harus sudah pernah berhaji sebelumnya. Karena sebuah kewajiban (kewajiban haji) tidak menghalangi amalan yang sunah, seperti halnya orang yang berpuasa sunah, ia tetap wajib melaksanakan puasa ramadan. Dan jika ia melakukan haji atas nama orang lain, maka ihramnya tersebut tetap sah untuk orang lain dan tidak berpindah ke dirinya, sebagaimana orang yang melakukan ibadah haji.⁶³

Imam Syafii mengatakan bahwa beliau tidak menyukai menyebut seseorang yang belum pernah melaksanakan haji dengan sebutan *ṣarūrah* (صَرُورَةٌ), sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās, Rasulullah saw. bersabda.

حَدَّثَنَا عِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي سَلِيمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرِ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ". (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ)⁶⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Usmān bin Abī Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abū Khālid yakni Sulaimān bin Hayyān al-Aḥmar, dari Ibn Juraij, dari ‘Umar bin ‘Aṭā’, dari ‘Ikrimah, dari Ibn ‘Abbās ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Tidak sepatutnya ada orang yang tidak menunaikan haji dalam Islam”. (H.R. Abū Dāwud, namun sanadnya lemah).

Dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwa salah satu makna dari *ṣarūrah* (صَرُورَةٌ) adalah orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, maka tidaklah seseorang yang mampu melaksanakan haji lalu ia tidak melaksanakannya. Disebutkan pula bahwa seseorang yang disebut dengan *ṣarūrah* (صَرُورَةٌ) tidak boleh melaksanakan haji atas nama

⁶²Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Ṣa’labī al-Baghdādī al-Mālikī, *Al-Talqīn fī Fiqh al-Mālikī*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 H/ 2004 M), h. 79.

⁶³Abū Bakr Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Yūnus al-Tamīmī al-Ṣiqilī, *Al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*, Juz 5 (Cet. I; Jāmi’ah Umm al-Qurā: Ma’had al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa Iḥyā al-Turās al-Islāmī, 1424 H/ 2013 M), h. 618.

⁶⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p: Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 152.

orang lain, artinya jika ia melaksanakan haji untuk orang lain, maka haji tersebut berubah menjadi haji untuk dirinya (bukan untuk orang yang digantikan) dan kewajiban hajinya telah gugur, sehingga ia bukan lagi termasuk orang yang disebut dengan *ṣarūrah* (صَرُورَة).⁶⁵

Mengenai hadis tentang Syubrumah, mazhab Maliki berpendapat bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* dalam masalah ini karena periwayatannya berhenti pada Ibn ‘Abbās atau merupakan hadis yang *mauqūf*. Bahkan di dalam kitab *al-Mu’taṣar min al-Mukhtaṣar min Musykil al-Āṣār* disebutkan bahwa hadis tentang Syubrumah adalah hadis yang cacat dan periwayatannya tidak sampai kepada Nabi saw.⁶⁶ Namun al-Baihaqī membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa hadis ini memiliki sanad yang sahih dan dalam masalah ini tidak ada hadis yang lebih sahih darinya.⁶⁷

Abū Dāwud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibn ‘Abbās dari Nabi saw., bahwa beliau mendengar hal ini dan mengatakan hal ini, serta sabda Nabi saw. yang mengatakan “Hajilah untuk dirimu sendiri, kemudian hajilah untuk Syubrumah”, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak sah ibadah haji yang dilakukan untuk menggantikan haji orang lain sedangkan *mubaddil* tersebut belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Adapun ihram haji yang berubah secara otomatis menjadi ihram untuk dirinya sendiri menunjukkan bahwa keistimewaan ihram dalam haji yang berbeda dengan ibadah yang lainnya.⁶⁸

Dan yang rajih menurut para ulama fikih adalah pendapat dari mazhab Syafii, telah banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih para ulama seperti kitab *Mauqī’ al-Islām Suāl wa Jawāb* yang ditulis oleh Muḥammad Ṣalīh al-Munajjid, kitab *Fatāwā tata’allaq bi Ahkām al-Ḥajj wa al-‘Umrah wa al-Ziyārah* yang ditulis oleh Ibn Baz, kitab *al-Fatāwā al-Yaumiyyah min Masāil al-Fiqhiyyah* yang ditulis oleh Aḥmad Mursyid, kitab *Fiqh al-Ṣiyām wa al-Ḥajj min Dalīl al-Ṭālib* yang ditulis oleh Ḥamd bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-‘Azīz al-Ḥamd dan beberapa kitab lainnya. Mereka semua sepakat mengatakan bahwa tidak boleh seseorang melaksanakan haji orang lain jika ia sendiri belum melaksanakan haji untuk dirinya sendiri.

Hal itu didasarkan pada kesahihahan dalil yang digunakan mazhab Syafii dalam masalah ini yakni hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās tentang Syubrumah, juga berdasarkan dari argumentasi mazhab Syafii bahwa badal haji yang dilakukan oleh *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji, maka haji itu menjadi haji untuk *mubaddil* tersebut dan bukan untuk orang yang ia gantikan. Dan argumentasi yang dikemukakan oleh mazhab Maliki bahwa untuk masalah ini haji dapat dikiaskan dengan zakat itu tidaklah benar, karena dalam hal ini, pelaksanaan badal haji yang dilakukan oleh *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji tidak bisa dikiaskan atau

⁶⁵Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad al-Khattābī, *Ma’ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāud)*, Juz 2, h. 240.

⁶⁶Jamāluddīn al-Mulṭī, *Al-Mu’taṣar min al-Mukhtaṣar min Musykil al-Āṣār*, Juz 1 (Bairūt: ‘Ālim al-Kutub, t.th), h. 191.

⁶⁷Muḥammad bin Ismā’īl al-Ṣan’ānī, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2, h. 506.

⁶⁸Uṣmān bin ‘Abd al-Raḥmān Abū ‘Amrū Taqyuddīn, *Syarḥ Musykil al-Waṣīṭī*, Juz 3 (Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Kunūz Isyībiyā, 1432 H/ 2011 M), h. 291.

disamakan dengan zakat. Adapun zakat, boleh diwakilkan kepada orang lain walaupun orang yang mewakilkan itu belum mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri.

Kamāl bin al-Sayyid Sālim berkata dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥi Mazāhib al-Aimmah*, bahwa yang paling utama adalah tidaklah seseorang melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain kecuali ia sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri sebagai bentuk untuk menghindari perselisihan pendapat dari para ulama, karena perkataan sahabat itu lebih utama dibanding perkataan orang lain, terlebih lagi tidak adanya sahabat yang menentang hal tersebut.⁶⁹ Bahkan disebutkan di dalam kitab *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, ketika ditanyakan terkait permasalahan ini, para ulama menjawab bahwa tidak boleh seorang melaksanakan haji atas nama orang lain jika ia belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dan mereka menggunakan hadis Rasulullah saw. tentang Syubrumah sebagai dalil mereka.⁷⁰

Setelah membaca dan mengkaji beberapa dalil dari kedua mazhab tersebut, yakni mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai masalah ini, maka peneliti lebih cenderung memilih pendapat mazhab Syafii, hal tersebut karena dalil yang dipakai oleh mazhab Syafii yang merupakan dalil khusus dan hadis tentang Syubrumah tersebut jelas menyebutkan bahwa seorang *mubaddil* haji adalah seseorang yang sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri, Rasulullah saw. jelas menyebutkan hal tersebut dalam zahir hadis ini dan walaupun hadis tersebut merupakan hadis yang *mauquf*, namun hadis tersebut lebih kuat dan sahih untuk digunakan sebagai dalil dalam masalah ini. Disamping itu, akan lebih baik jika orang menggantikan haji orang lain adalah orang yang dapat dipercaya dan memahami rangkaian dan tata cara ibadah haji dengan baik dan benar.

Adapun mazhab Maliki, walaupun menggunakan dalil yang sahih, akan tetapi hadis tersebut merupakan dalil umum tentang bolehnya melaksanakan badal haji atas nama orang lain. Oleh karena itu, tidak ada penyebutan secara rinci mengenai status *mubaddil* tersebut. Dan untuk permasalahan ini, dalil khusus lebih utama untuk digunakan dibandingkan dengan dalil umum.

Berdasarkan analisis komparatif antar pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang keabsahan badal haji pada *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji, maka peneliti menyimpulkannya dengan tabel sebagai berikut.

| No. | Persamaan | Perbedaan | Mazhab Maliki | Mazhab Syafii |
|-----|--------------|-----------|---|---|
| 1. | Sumber hukum | - | Mazhab Maliki menggunakan hadis Rasulullah saw. sebagai dalil dan sumber hukum. | Mazhab Syafii menggunakan hadis Rasulullah saw. sebagai dalil dan sumber hukum. |
| 2. | - | Dalil | Mazhab Maliki beristinbat dengan hadis Rasulullah | Mazhab Syafii beristinbat dengan hadis Rasulullah |

⁶⁹Abū Mālik Kamāl bin Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 2 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tauḥīdīyah, 2003 M), h. 168.

⁷⁰Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz 11 (al-Riyād: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā, t.th), h. 50.

| | | | | |
|----|---|-----------------------|---|---|
| | | | saw. yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās tentang seorang Wanita yang bertanya kepada beliau apakah boleh melaksanakan haji untuk ayahnya yang sudah meninggal. | saw. juga yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās tentang seseorang yang melaksanakan haji atas nama Syubrumah. |
| 3. | - | Pemahaman makna dalil | Mazhab Maliki berpendapat bahwa boleh seorang <i>mubaddil</i> haji yang belum melaksanakan haji untuk menggantikan haji orang lain karena keumuman dari hadis Nabi saw. Sebab dalam hadis, Rasulullah saw. tidak bertanya kembali kepada wanita tersebut mengenai status hajinya (apakah ia sudah pernah berhaji atau belum). | Mazhab Syafii berpendapat bahwa tidak boleh seorang <i>mubaddil</i> yang belum pernah melaksanakan haji untuk menggantikan haji orang lain, karena Rasulullah saw. jelas menyebutkan dan menyuruh orang yang bertalbiyah atas nama Syubrumah untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. |
| 4. | - | Hukum | Badal haji yang dilakukan oleh <i>mubaddil</i> tersebut tetap sah untuk orang yang ia gantikan sebab mazhab Maliki tidak mempersyaratkan bahwa <i>mubaddil</i> tersebut harus sudah pernah berhaji sebelumnya. Walaupun ada Sebagian | hukum haji tersebut batal dan berubah untuk dirinya sendiri sebab mazhab Syafii tidak memperbolehkan pelaksanaan badal haji yang dilaksanakan oleh seorang <i>mubaddil</i> yang belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | pengikutnya yang mengatakan makruh. | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki tidak memperbolehkan adanya pelaksanaan badal haji sebagai pengganti ibadah haji untuk orang yang masih hidup karena ibadah haji merupakan ibadah yang berkaitan dengan ibadah fisik dan bukan harta. Adapun untuk orang yang meninggal, mazhab Maliki memperbolehkannya dengan syarat, orang tersebut berwasiat sebelum meninggal. Dalam pelaksanaan badal haji, mazhab Maliki tidak mempersyaratkan seorang *mubaddil* yang sudah pernah melaksanakan haji sebelumnya dengan bersandar pada dalil umum dibolehkannya pelaksanaan badal haji. Sedangkan Mazhab Syafii memperbolehkan pelaksanaan badal haji bagi orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup dengan syarat ia merupakan orang yang lemah (مَعْضُوبٌ) seperti orang yang sudah tua dan memiliki penyakit. Dalam pelaksanaan badal haji, mazhab Syafii mempersyaratkan bahwa seorang *mubaddil* harus sudah pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dengan bersandar pada dalil khusus, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās tentang Syubrumah.
2. Persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii yakni pada penggunaan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās sebagai sumber hukum. Adapun perbedaannya terletak pada hukum dan pengambilan dalil, mazhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya sah dan boleh bagi seorang *mubaddil* yang belum pernah melaksanakan haji untuk menggantikan haji orang lain dengan bersandar pada dalil umum tentang bolehnya melaksanakan badal haji sehingga sah badal haji tersebut jika dilakukan, sedangkan mazhab Syafii melarang pelaksanaan badal haji jika *mubaddil* tersebut belum pernah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri dengan bersandar pada dalil khusus yang jelas membahas tentang permasalahan ini sehingga tidak sah badal haji tersebut jika dilakukan. Setelah membaca dan mengkaji pendapat dan dalil dari kedua mazhab tersebut, peneliti lebih cenderung untuk memilih pendapat mazhab Syafii, walaupun hadis tentang Syubrumah merupakan hadis yang *mauqūf* dan ada dalil yang lebih sahih darinya dalam permasalahan ini, namun dalil khusus (hadis tentang Syubrumah) dalam hal ini lebih diutamakan daripada dalil umum (hadis badal haji). Dan yang rajih menurut para ulama adalah pendapat dari mazhab Syafii.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān al-Karīm.

Buku:

Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Cet. I; Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2019.

Al-‘Aīṭah, Al-Hājjah Dirayyah. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā Mazhab al-Syāfi’ī*, Juz 1 (t.d).

- Aizid, Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. I; Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Akbar, Khaerul. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA* Makassar. Makassar: STIBA Publishing, 2023.
- Anas, Mālik bin. dkk. *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwaṭṭa'*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: Markaz Hajar li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-'Arabīyyah wa al-Islamiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Al-Andālūsī, Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyūb Wārīs al-Tujaibī al-Qurtubī al-Bājī. *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*. Cet. I; Miṣr: Matba'ah al-Sa'ādah, 1332 H.
- Arifin, Agus. *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah (Edisi Revisi)*. Cet. II; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Al-Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Tawālī al-Ta'sīs lima'ālī Muḥammad bin Idrīs*. Cet. I; Bairūt: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M.
- Al-'Audah, Salmān. *Ma'a al-Aimmah*. Cet. I; al-Riyāḍ: Muassasah al-Risālah, 1433 H.
- Al-Azharī, Sulaimān bin Umar bin Mansūr al-'Ajlī. *Hāsyīyah al-Jamal 'ala Syarḥ al-Minhaj*, Juz 2. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/ 1996 M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi'ī li al-Baihaqī*, Juz 1. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/ 1970 M.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Muḥammad bin al-Husain bin 'Alī. *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 4. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.
- Bāsyānfar, Sa'īd bin 'Abd al-Qādir. *Al-Mughnī fī Fiqh al-Ḥajj wa al-'Umrah*. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Ilm, 1414 H/1993 M.
- Batubara, Chuzaimah. dkk. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Al-Daqr, 'Abd al-Ghanī. *al-Imām Mālik bin Anas Imām Dār al-Hijrah*. Cet. III; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1419 M/ 1998 H.
- Al-Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad bin Mahdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Bagdādī. *Sunan al-Dāruquṭnī*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 2. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Fandalāwī, Abū al-Ḥajjāj Yūsuf bin Dūnās. *Tahzīb al-Masālik fī Naṣrah Mazhab Mālik*, Juz 2. Cet. I; Tūnis: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1430 H/ 2009 M.
- Fiantika, Fina Rita. dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Al-Garnāṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin Juzai al-Kalabī. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (t.d).
- Al-Halabī, Al-Ḥajah Najāḥ. *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Hanafī* (t.d).
- Al-Ḥanafī, Qāsim bin 'Abdullāh bin Amīr 'Alī al-Qūnawī al-Rūmī. *Anīs al-Fuqahā fī Ta'rīfāt al-Alfāz al-Mutadāwalah Baina al-Fuqahā*. t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2004 M,
- Al-Harīqī, Ḥammad bin Ibrāhīm. *Al-Tauhid wa Aṣaruhu fī Ḥayāti al-Muslim*. Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1414 H/ 1993 M.

- Al-Ja'fī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. V; Dimasyq: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Al-Jazāmī, Abū Muḥammad Jalāluddīn 'Abdullāh bin Najm bin Syāsy bin Nizār. *'Aqd al-Jawāhir al-Ṣamīnah fī Mazhab 'Ālim al-Madīnah*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Gharb al-Islamī, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Jazūrī, 'Abdurrahman bin Muḥammad 'Iwāḍ. *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz . Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Juhanī, Māni' bin Ḥammād. *Al-Mausū'ah al-Muyassarah fī al-Adyān wa al-Mazāhib wa al-Aḥzāb al-Mu'āṣirah*, Juz 1. Cet. IV; Riyāḍ: Dār al-Nadwah al-Ālimiyyah li al-Ṭibā'at wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H.
- Jumali, Endang, dkk. *Ekosistem Haji*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Kartono, Ahmad. *Fiqh Kontemporer Haji dan Umrah: Perspektif Empat Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2023.
- Al-Kasānī, Abū Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad. *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-syarāi'*, Juz 2. Cet. I; Miṣr: Matba'ah Syarikah al-Maṭbū'āh al-'Ilmiyyah, 1327-1328 H.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qurā, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional Tentang Badal Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Fiqh haji Komprehensif*. Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad. *A'lām al-Ḥadīs*, Juz 2. Cet. I; t.t.p: Jāmi'ah Umm al-Qurā, 1409 H/ 1988 M.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad. *Ma'ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāud)*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1418 H/ 1997 M.
- Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz 11. Al-Riyāḍ: Riāsah Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā, t.th.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet. I, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī. *Al-Mudawwanah*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Majjājī, Muḥammad Sukḥāl. *Al-Muḥazzab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 1. Cet. I; Dimasyq: Dār al-Qalam, 1431 H/ 2010 M.
- Malik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abd. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Mālikī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Alī bin 'Umar al-Tamīmī al-Māzī. *Syarḥ al-Talqīn*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015 M.
- Al-Mālikī, Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdillāh bin al-'Arabī al-Andalusī. *Al-Qobas fī Syarḥ al-Muwaṭṭa' Ibn Anas*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971 M.
- Al-Mālikī, Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb bin 'Alī bin Naṣr al-Ṣa'labī al-Baghdadī. *Al-Talqīn fī al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/ 2004 M.

- Al-Malikī, Abū al-Hajjaj Yūsuf bin Dūnās al-Magribī al-Fandalāwī. *Tahzīb al-Masālik fi Naṣrah Maẓhab al-Mālik*. Cet. I; Tūnis: Dār al-Garb al-Islāmī, 1430 H/2009 M.
- Al-Maqdisī, Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah. *Al-Mugnī*, Juz 5. Cet. III; al-Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1417 H/ 1997 M.
- Al-Mazīdī, Aḥmad Farīd. *Al-Maẓhab al-Mālikī*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971 M.
- Al-Mubārakfūrī, ‘Ubaidillah al-Raḥmānī. *Mir’āh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ*, Juz 8. Cet. III; Banāras al-Hindī: Idāratu al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Da’wah wa al-Iftā, 1404 H/ 1984 M.
- Muḥammad, ‘Abdullāh bin. dkk. *Fiqh al-Muyassar*, Juz 4. Cet. II; al-Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1433 H/ 2012 M.
- Muḥammad, Ibrāhīm bin ‘Ali bin. *Al-Dībāj al-Maẓhab fī Ma’rifah A’yān ‘Ulamā al-Maẓhab*, Juz 1. Al-Qāhirah: Dār al-Turās li al-Ṭaba’i wa al-Nasyr, 1433 H.
- Al-Muḥtasib, Aḥmad Nāfiẓ. *Syakhṣiyyah Islamiyyah ‘Urfuhā al-Tārīkh wa lan Yansāhā*. Cet. I: ‘Ammān: Dār Ghaidā li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1431 H/ 2011 M.
- Al-Mulṭī, Jamāluddīn. *Al-Mu’taṣar min al-Mukhtaṣar min Musykil al-Āsār*, Juz 1. Bairūt: ‘Ālim al-Kutub, t.th.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muṣṭafā*, Juz 4. Turkiyā: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn bin Syaraf. *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 7. Al-Qāhirah: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn bin Syaraf. *Tahzīb al-Asmā wa al-Luḡāt*, Juz 2. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Nukhbah min al-‘Ulamā. *Al-Tafsīr al-Muyassar*. Cet. II; Madīnah: Mujamma’ al-Malik Fahd li al-Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Qaḥṭānī, Sa’īd bin ‘Ali bin Wahf. *Manāsik al-Ḥajj wa al-‘Umrah fī al-Islām fī Dawwi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. II; al-Qaṣb: Markaz al-Da’wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M.
- Al-Qaṭṭān, Manna’ bin Kholīl. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Cet. V; t.t.p.: Maktabah Wahbah, 1422 H/ 2001 M.
- Al-Qawāsīmī, Akram Yūsuf ‘Umar. *Al-Madkhal ilā Maẓhab al-Imām al-Syāfi’ī*. Cet. I; ‘Ammān: Dār al-Nafāis, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Qazwīnī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yāzīd bin Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 3. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālimiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’an*, Juz 2. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/ 1964 M.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr bin ‘Āṣim al-Namarī. *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 1. Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīṣah, 1400 H/ 1980 M.
- Al-Rif’ah, Abū al-‘Abbās Najmuddīn Aḥmad bin Muḥammad bin. *Kifāyah al-Nabīh Syarḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.

- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1397 H/ 1977 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Cet I; Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Al-Sajastānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’ās al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīhi Mazāhib al-Aimmaḥ*, Juz 2. Al-Qāhirah: Maktabah al-Tauqīfiyyah, 2003 M.
- Al-Ṣan’ānī, Muḥammad bin Ismā’il. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2. Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Ma’ārif, 1427 H/ 2006 M
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Ṣiqilī, Abū Bakr Muḥammad bin ‘Abdillah bin Yūnus al-Tamīmī. *Al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*, Juz 5. Cet. I; Jāmi’ah Umm al-Qurā: Ma’had al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa Iḥyā al-Turās al-Islāmī, 1424 H/ 2013 M.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Al-Suwaidān, Ṭarīq. *Al-Imām al-Syāfi’i al-Sīrah al-Muṣawwarah*. Cet. III; Kuwait: al-Ibda’ al-Fikrī, 1433 H/ 2012 M.
- Al-Syāfi’i, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*, Juz 2. Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Al-Syāfi’i, Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Imrānī al-Yamanī. *Al-Bayān fī Mazhab al-Syāfi’i*, Juz 4. Cet. I; Jaddah: Dār al-Manhaj, 1421 M/ 2000 H.
- Al-Syāfi’i, Syihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Ali bin Ruslān al-Maqdisī al-Ramlī. *Syarḥ Sunan Abū Dāwud*, Juz 8. Cet. I; Fayyūm: Dār al-Falāḥ li al-Baḥs al-Ilmī wa Taḥqīq al-Turās, 1437 H/ 2016 M.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Fairūzābādī. *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 1. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/ 1995 M.
- Al-Tahānawī, Zūfar Aḥmad al-‘Usmānī. *I’lā al-Sunan*, Juz 10. Karātsyī: Idārah al-Qur’ān wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, 1418 H.
- Tahir, Rusdin. dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Al-Talmasānī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Abi Bakr bin ‘Abdillah al-Anṣarī. *Al-Luma’ fī al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Imām Mālik*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Taqyuddīn, ‘Usmān bin ‘Abd al-Raḥmān Abū ‘Amrū. *Syarḥ Musykil al-Waṣīf*, Juz 3. Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1432 H/ 2011 M.
- Al-Tirmizī, Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 M.

- ‘Umar, Aḥmad Mukhtar ‘Abd al-Ḥamīd. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabīyyah al-Muāṣirah*, Juz 1. Cet. I; t.t.p: ‘Ālim al-Kutub, 1429 H/ 2008 M.
- ‘Uqail, Abū al-Wafā Ibn. *Al-Taḥḍīr fī Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Hanbal*. Cet. I; al-Riyād: Dār Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1422 H/ 2001 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Manāsik al-Ḥajj wa al-‘Umrah wa al-Masyrū’ fī al-Ziyārah*. Cet. I; ‘Unaizah: Maktabah al-Ummah, 1413 H.
- Waḥdah al-Baḥṣ al-‘Ilm. *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah Aimmatuhā Aṭwāruhā Uṣūluhā Āṣāruhā*. Cet. I; Kuwait: Idārah al-Iftā, 1436 H/ 2015 M.
- Al-Wahhāb, ‘Alī al-Jum’ah Muḥammad ‘Abd. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II; al-Qāhirah: Dār al-Salām, 1422 H/ 2001 M.
- Al-Wallawī, Muḥammad ‘Alī bin Ādam bin Mūsā al-Atyūbī. *Syarḥ Sunan al-Nasāī*, Juz 23. Cet. I; Makkah: Dār al-Barūm, 1424 H/ 2003 M.
- Al-Yaḥṣabī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā. *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, Juz 1. Cet. I; al-Maghrib: Maṭba’ah Faḍālah, 1965 M.
- Al-Yamanī, Nisywān bin Sa’īd al-Ḥamīrī. *Khulāṣah al-Siyar al-Jāmi’ah li ‘Ajāib Akhbār al-Mulūk al-Tabābi’ah*. Cet. II; Bairūt: Dār al-‘Audah, 1978 M.
- Al-Yamanī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Syaukāni. *Nail al-Auṭār*, Juz 4. Cet I; Miṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1993 M/1413 H.
- Al-Ḍahabī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān bin Qaimāz. *Siyar A’lām al-Nubalā*, Juz 7. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1428 H/ 2006 M.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. *Al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islamiyyah*, Juz 2. Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1413 H/ 1993 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 3. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Kisworo, Budi. “Ibadah Haji Ditinjau Dari Berbagai Aspek.” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no.1 (2017): h. 75-98.
- Malik, Abdul. “Badal Haji.” *Raudhah* 4, no. 1 (2016): h. 97-105.
- Umia, dkk. “Badal Haji: Analisis Kritis Pandangan Maliki dan Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Al-Muqaranah* 1, no. 2 (2023): h. 10-23.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

- Aswin, Febriyanti. “Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat (Analisis Perbandingan Mazhab)”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2019.
- Auliyah, Ishma. “Hukum Qada Haji bagi Orang yang Telah Meninggal (Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali)”. *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2022.
- Ruswanti, Ika. “Hukum Badal Haji Bagi Orang yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki”. *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah UIN Saifuddin Zuhri, 2021.